

BAB VI

PENUTUP

6.1 Kesimpulan

Implementasi akuntansi Investasi Jangka Panjang Non Permanen Pemerintah Kota Kupang telah sesuai dengan peraturan yang berlaku yaitu peraturan perundang-undangan. Dimulai dari aktivitas perolehan investasi, pengakuan investasi, pengukuran investasi, penilaian setelah pengakuan dengan metode yang diperbolehkan. Namun untuk pengungkapannya, masih terdapat hal-hal yang belum diungkapkan dalam neraca seperti akun pinjaman jangka panjang, investasi dalam surat utang negara, dan investasi dalam proyek pembangunan serta Catatan atas Laporan Keuangan yang mana informasi tersebut juga berguna bagi pengguna laporan keuangan. Catatan atas Laporan Keuangan yang dimaksud adalah perubahan harga pasar baik investasi jangka panjang maupun jangka panjang, penurunan nilai investasi yang signifikan dan penyebab penurunan tersebut, investasi yang dinilai dengan wajar dan alasan penerapannya dan perubahan pos investasi. Sementara itu kebijakan akuntansi untuk mengelola Investasi Jangka Panjang Non Permanen Kota Kupang telah diungkapkan dengan baik.

6.2 Saran

1. Bagi Pemerintah Kota Kupang

Sesuai dengan hasil tinjauan implementasi akuntansi Investasi Jangka Panjang Non Permanen Pemerintah Kota Kupang sebagaimana

dijelaskan di atas, permasalahan yang masih terdapat dalam pelaksanaan akuntansi investasi tersebut adalah pada bagian pengungkapan laporan keuangan. Dengan demikian Pemerintah Kota Kupang disarankan agar lebih menyempurnakan pengungkapan laporan keuangannya agar dapat informasi keuangan lebih jelas bagi pengguna laporan keuangan tersebut.

2. Bagi Penelitian Selanjutnya

Berdasarkan hasil penelitian dapat dilihat bahwa yang menjadi masalah pada penelitian ini adalah pada unit pengelola yang tidak mengembalikan sehingga disarankan penelitian selanjutnya dapat meneliti secara lebih lanjut.

DAFTAR PUSTAKA

- Arifin, Johar & A. Fauzi. 1999. *Aplikasi Exel Dalam Aspek Finansal Studi Kelayakan*. Penerbit Gramedia. Jakarta
- Dewi, Alfiani Purnama & Siswanto. 2018. Penerapan Akuntansi Investasi Jangka Panjang Pada Pemerintah Daerah Kabupaten Sleman Tahun Anggaran 2016. *Jurnal Substansi* Vol. 2 No. 2 hal. 214-238.
- Husnan, Suad. 1994. *Dasar-Dasar Teori Perfotofolio Dan Anlisis Sekuritas*. Edisi 1. Yogyakarta : UPP AMP YKPN.
- Ibrahim, Y. 2003. *Studi Kelayakan Bisnis*. JAKARA : Rineka Cipta.
- Kasmir. 2003. *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*. Jakarta : Raja Grafindo Persada.
- Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksaan Keuangan Tahun 2017-2019.
- Miles, B. Mathew dan Michael Huberman. 1992. Analisis Data Kualitatif Buku Sumber Tentang Metode-metode Baru. Jakarta: UIP
- Republik Indonesia. Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2019 *Tentang Investasi Pemerintah*. Jakarta.
- Republik Indonesia. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Tahun 2011 *Tentang Sistem Akuntansi Investasi Pemerintah*. Jakarta.
- Standar Akuntansi Keuangan. 2018. Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah No.06 (Revisi 2016), Ikatan Akuntan Indonesia. Jakarta.
- Sugiyono. 2015. *Metode Penelitian Kombinasi (Mix Methods)*. Bandung : Alfabeta.
- Santoso, Urip dan Yohanes Joni Pabelum, 2008.” Pengaruh Penerapan Akuntansi Sektor Publik Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi. Pemerintah Dalam Mencega Fraud”. *Jurnal Administrasi Bisnis*, Vol.4, No 1: hal. 14-33, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Katolik Parahyangan
- Umbara, Citra. 2004. KUHD (Kitab Undang-Undang Hukum Dagang), Dilengkapi : UU No. 37 Th.2004 Tentang Kepailitan Beserta Penjelasan. Bandung.
- Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 *Tentang Pemerintah Daerah*. Jakarta

Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 *Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah*. Jakarta

Wibowo, Ruli Rudi. 2011. *Strategi Pengembangan Investasi Daerah Di Kabupaten Wonosobo*. Skripsi. Jurusan Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Semarang.